

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)

Tuti Herawati

Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School

Abstrak

Pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 83%. Secara parsial, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi, hanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : *Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*

PENDAHULUAN

Nasution (2007) menyatakan ada beberapa kelemahan dalam sistem keuangan negara Indonesia di era orde baru yaitu: (1) kelemahan dalam desain dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, (2) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (3) penyimpanan keuangan negara yang semrawut, (4) tidak adanya informasi tentang aset dan hutang negara, dan (5) pengungkapan laporan keuangan pemerintah yang tidak konsisten dan tidak memadai. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh. Salah satu upaya yang dilakukan menyusun paket undang-undang keuangan negara yaitu: Undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 31 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedang Pasal 31 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pada tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Nasution (2007)).

Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI)

seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh." Pada tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Sistem pengendalian intern baru ditetapkan pada tahun 2008 yaitu PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)(Nasution (2007).

Pasal 15 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan pemeriksa (BPK) menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Pasal 16 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Di dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK wajib menguji dan menilai SPI pemda yang bersangkutan, seperti diamanatkan dalam pasal 12 UU nomor 15 tahun 2004 berbunyi "Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah." Tujuan SPI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan bagi pemda digunakan untuk memperbaiki sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern. (Nasution (2007).

Tabel 1.1
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2005-2010 Berdasarkan Tingkat
Pemerintahan

Tahun	Provinsi				Kabupaten				Kota						
	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml
2005	2	28	1	1	32	14	213	10	20	257	2	66	2	3	73
	6%	88%	3%	3%	100%	5%	83%	4%	8%	100%	3%	90%	3%	4%	100%
2006	0	25	4	4	33	2	236	21	85	344	1	66	3	16	86
	0%	76%	12%	12%	100%	1%	68%	6%	25%	100%	1%	77%	3%	19%	100%
2007	1	21	3	8	33	1	201	45	103	350	2	61	11	12	86
	3%	64%	9%	24%	100%	1%	57%	13%	29%	100%	2%	71%	13%	14%	100%
2008	0	24	1	8	33	6	235	26	96	363	7	64	4	14	89
	0%	73%	3%	24%	100%	2%	65%	7%	26%	100%	8%	72%	4%	16%	100%
2009	1	24	3	5	33	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	3%	73%	9%	15%	100%	2%	63%	10%	25%	100%	7%	72%	9%	12%	100%
2010	6	20	0	2	28	15	200	10	35	260	11	51	2	6	70
	22%	71%	0%	7%	100%	6%	77%	4%	13%	100%	16%	73%	3%	8%	100%
Rata-rata untuk 2005-2010 (rata-rata)	2	24	2	4	32	8	221	25	72	326	5	63	5	10	83
	6%	75%	6%	13%	100%	2%	68%	8%	22%	100%	6%	76%	6%	12%	100%

Sumber : www.bpk.go.id (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011)

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa rata-rata opini LKPD Tahun 2005 s.d. 2010 pada pemerintahan tingkat provinsi dan kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintah tingkat kabupaten. Pemerintah provinsi dan kota memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) sekitar 81% dan 82% dari keseluruhan entitas provinsi dan kota, dibandingkan pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP dan WDP hanya sekitar 70%.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengendalian intern pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP pada umumnya telah memadai sedangkan yang opininya WDP cukup memadai. Adapun pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini TMP dan TW memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Salah satu penyebabnya adalah adanya kelemahan di dalam sistem pengendalian intern (SPI) pemda.

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dapat diberikan auditor apabila telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelas. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian diberikan apabila: 1) Tidak ada bukti yang kompeten dan mencukupi atau adanya pembatasan lingkup audit yang

material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, 2) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat Tidak Wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat apabila: 1) Ada pembatasan yang sangat material terhadap lingkup audit, 2) Auditor tidak independen terhadap klien. Terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor tidak diperkenankan mencantumkan paragraf lingkup audit apabila ia menyatakan untuk tidak memberikan pendapat (**Indra, 2011:194-196**).

Dari berbagai uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa system pengendalian intern mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Sistem Pengendalian Intern

Menurut **I Gusti Agung Rai (2008:283)** "Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya."

Menurut **Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008** "Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan system pengendalian intern.

Pengembangan unsur system pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan criteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Menurut **Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008** bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas (**Indra, 2011:11**) adalah :

- a) Nilai integritas dan etika. Memelihara suasana etika organisasi, menjadi teladan untuk tindakan-tindakan yang benar. Menghilangkan godaan-godaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan menegakkan disiplin sebagaimana mestinya;
- b) Komitmen terhadap kompetensi. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing oisisi dalam instansi pemerintah.
- c) Filosofi dan gaya operasi manajemen; f). Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan;
- d) Stuktur organisasi; h). Kerangka kerja bagi manajemen; i). dalam perencanaan, pengarahan, dan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi;
- e) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. Satuan usaha membatasi garis

- tanggung jawab dan wewang yang ada;
- f) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM. Penetapan praktik-praktik yang layak dalam hal perolehan, orientasi, pelatihan, evaluasi, pembinaan, promosi, kompensasi dan tindakan disiplin bagi sumber daya manusia.
2. **Penilaian Risiko.** Menurut **Indra (2011:12)** Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Penaksiran risiko mencakup:
 - a. **Identifikasi Resiko.** Mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.
 - b. **Analisis Resiko.** Menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.
 3. **Kegiatan Pengendalian.** Menurut **Indra (2011:12)** Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup :
 - a. **Otorisasi yang memadai.** Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai.
 - b. **Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.**
 - c. **Pengecekan secara independen.**
 - d. **Pemisahan fungsi yang memadai.** Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1(satu) orang.
 - e. **Pengendalian fisik atas kekayaan pemda dan catatan.** Pimpinan instansi pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai.
 - f. **Peninjauan atas kinerja.** Memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut dibandingkan dengan rencana sebagai tolak ukur kinerja.
 4. **Informasi dan Komunikasi.** Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan mencegah terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan (**Indra, 2011:12**). Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
 5. **Pemantauan.** Proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu (**Indra, 2011:13**). Dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi,

pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam melaksanakan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti : pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. (Mardiasmo:2009:20).

Menurut Mardiasmo (2009:20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu : (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Pertanggung jawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan

pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggung jawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. (Mardiasmo:2009:21).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah: "Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan".

Menurut Mahmudi (2007:11) definisi laporan keuangan adalah: "Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas".

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

1. Relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan

maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:
- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
 4. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Hubungan Sistem Pengendalian Intern dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan sistem pengendalian internal menurut **Warren et al (2005)** salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami

kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (internal control).

Weygandt et al (2005) mengungkapkan bahwa: "Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit (Auditabel).

Hall (2007:182) mengemukakan fungsi dari sistem pengendalian internal yaitu sebagai pelindung yang melindungi aktiva perusahaan dari banyaknya peristiwa yang tidak diinginkan yang menyerang perusahaan. Ini semua meliputi usaha untuk akses secara tidak sah ke aktiva perusahaan, penipuan yang dilakukan oleh orang dalam dan luar perusahaan, kesalahan karena karyawan tidak kompeten, program komputer salah data input yang rusak, dan lain sebagainya.

Mahmudi (2007: 27) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Darya Setia Nugraha (2010) melakukan penelitian dengan judul penelitian "The Influence Of Internal Control System To The Reliability Of Local Government Financial Statement". Populasi dari penelitian ini adalah 37 OPD, dimana sampel dari penelitian ini adalah 29 OPD. Pemilihan sampel didasarkan

pada OPD yang terletak di daerah Bandung, OPD yang dijadikan sampel tidak termasuk rumah sakit daerah, dan responden dari OPD yang dijadikan sampel diprioritaskan kepada para pegawai pada bagian keuangan yang meliputi fungsi penyimpanan / pemegang uang, fungsi penatausahaan / verifikasi, dan fungsi pencatatan / akuntansi / pembukuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari (2009) melakukan penelitian dengan Judul penelitian "Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah" (Survey pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya). Dari hasil penelitian menyatakan bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai Pengawasan Intern pada Dinas Kota Tasikmalaya Pengawasan Intern yang dilakukan atasan langsung terhadap bawahan telah dilakukan dengan baik pada Dinas Kota Tasikmalaya, atau dengan kata lain Dinas Kota Tasikmalaya telah melakukan Pengawasan Intern dengan baik.

Hubungan Lingkungan Pengendalian (X₁) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Lingkungan pengendalian merupakan pengendalian yang mempengaruhi keseluruhan organisasi dan menjadi "atmosfir individu organisasi di dalam melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab atas pengendalian yang menjadi bagiannya. Dengan kata lain, Lingkungan Pengendalian merupakan pondasi dasar yang mendasari suatu sistem pengendalian intern pemerintah. Apabila Lingkungan Pengendalian menunjukkan kondisi yang baik, maka dapat memberi pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya, apabila lingkungan pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat (**Tony, 2008:5**).

Hubungan Penilaian Resiko (X_2) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Penilaian resiko terkait dengan aktivitas bagaimana entitas mengidentifikasi dan mengelola resiko sehingga entitas dapat meminimalisasi terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui proses penilaian resiko ini, maka setiap entitas dapat mengantisipasi setiap kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal (Tony, 2008:6).

Menurut Anindita (2006:229), penilaian resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan resiko dari suatu pemerintahan daerah yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan Kegiatan Pengendalian (X_3) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Menurut Anindita (2006:230) Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Pengendalian Umum, meliputi organisasi pusat pengolahan data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data.
- b. Pengendalian Aplikasi, mempunyai tujuan untuk menjamin bahwa semua transaksi yang telah diproses sekali saja secara lengkap, menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti, menjamin bahwa hasil pengolahan data dan transaksi benar dan sesuai keadaan, menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan, dan menjamin bahwa aplikasi dapat terus menerus berfungsi.

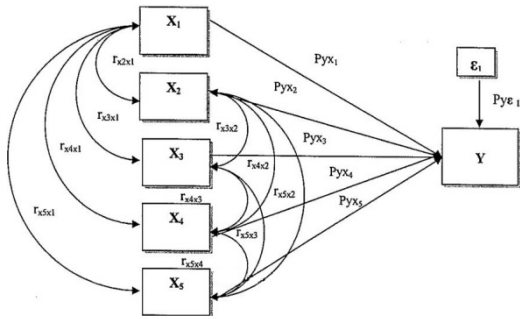
Hubungan Informasi dan Komunikasi (X_4) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Laporan keuangan yang dihasilkan melalui sistem akuntansi adalah salah satu bentuk informasi yang paling penting karena diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menganalisa dan melaporkan transaksi serta menyelenggarakan pertanggung jawaban kekayaan dan utang dari suatu pemerintah daerah, sedangkan komunikasi yang baik yang terjalin antar personel pemerintah daerah dapat memudahkan terjadinya perputaran informasi, hal ini akhirnya dapat menambah akurasi dari suatu laporan keuangan (Anindita, 2006:230).

Hubungan Pemantauan (X_5) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Menurut Wawan (2009:578) pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan secara efektif dapat mengakibatkan sistem akuntansi keuangan daerah yang ditetapkan berjalan dengan baik, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, pemeberian wewenang dan keleluasaan harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan dapat menjadi jaminan yang cukup tidak hanya untuk sistem akuntansi keuangan daerah, namun memberikan pula jaminan yang cukup bagi sasaran kinerja yang ingin dicapai, dilaksanakannya pengawasan intern yang efektif dan kontinyu pada kegiatan dapat menjamin kinerja pemerintah daerah tercapai dengan baik.

Berdasarkan penelusuran teori dan hasil peneelitian, maka model penelitian dapat dibuat dalam paradigma seperti dibawah ini :



Gambar 1.
Model Penelitian

Hypothesis

Hipotesis penelitian dapat disajikan sebagai berikut :

H₀: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H₁: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan dibahas dalam sebuah penelitian (Sugiyono; 2009:41). Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di kabupaten Cianjur. Data hasil penelitian merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan (Skoring) (Sugiyono, 2011:23).

Sementara itu jika dilihat berdasarkan metode yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk ke dalam metode penelitian survey. Menurut Sugiyono (2006:7) penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data

dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.

Menurut Sugiyono (2010:389) populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Umi Narimawati (2008:161), populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Cianjur yang berjumlah 74 OPD.

Menurut Sugiyono (2010:389) sampel adalah sebagian dari populasi itu. Sedangkan menurut Umi Narimawati (2008:161) Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian ini. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representatif* (mewakili).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling Purposive*, artinya penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Sekretariat DPRD, lembaga teknis daerah dan dinas daerah di Kabupaten Cianjur. Adapun jumlah sampel yang diteliti dari OPD yang berada di Kabupaten Cianjur yaitu berjumlah 31 OPD. Subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah. Adapun yang menjadi reponden dalam penelitian ini adalah Inspektorat Daerah yang membina dan mengawasi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di kabupaten Cianjur.

Menurut Sugiyono (2010:401) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Studi kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*). Dalam teknik pengumpulan data primer seperti kuesioner merupakan teknik yang digunakan oleh para peneliti dalam pengumpulan data penelitian ini yang akan diolah untuk menjawab hipotesis. Metode yang digunakan adalah metode survei.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner secara personal dimana kuesioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur. Data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dibuat berupa skoring untuk masing-masing pernyataan (**Sugiyono, 2011:13**). Skala yang digunakan dalam penelitian untuk pembobotan item kuesioner adalah menggunakan Skala Likert.

Menurut (**Sugiyono, 2011: 267**) Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal yang berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai, dan

validitas eksternal yang berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil.

Untuk pengujian kualitas data digunakan uji validitas, Menurut (**Sugiyono, 2011: 267**) Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Pengujian validitas menggunakan korelasi *Product Moment*. Setelah dilakukan pengujian validitas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian reliabilitas. **Sugiyono (2011:130)** menyatakan bahwa : "Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan *test-retest (stability)*, *equivalent*, dan gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada dengan teknik tertentu".

Pengujian reliabilitas pengujian reliabilitas instrumen menggunakan *internal consistency*, dimana instrumen dicobakan sekali saja. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dalam hal ini digunakan teknik belah dua dari *Spearman Brown (Split half)*.

Pengujian analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur. **Harun (2001:7-9)** menyatakan bahwa langkah kerja yang disarankan untuk diikuti adalah sebagai berikut :

- 1) Gambarkan dengan jelas diagram jalur yang mencerminkan proposisi hipotetik yang diajukan, lengkap dengan persamaan strukturnya. Di sini kita harus bisa menterjemahkan hipotesis penelitian yang kita ajukan kedalam diagram jalur, sehingga bisa tampak jelas variabel apa saja yang merupakan variabel eksogenus dan apa yang menjadi variabel endogenusnya.
- 2) Hitung matriks korelasi antar variabel.
- 3) Identifikasikan sub-struktur dan persamaan yang akan dihitung koefisien jalurnya. Misalkan saja dalam sub-struktur yang telah kita identifikasi terdapat k buah variabel eksogenus, dan sebuah (selalu hanya sebuah) variabel

edogenous Y yang dinyatakan oleh persamaan :

$$Y = \rho_{yx1} X_1 + \rho_{yx2} X_2 + \rho_{yx3} X_3 + \rho_{yx4} X_4 + \rho_{yx5} X_5 + \varepsilon$$

Hitung matriks korelasi antar variabel eksogenous yang menyusun sub-struktur tersebut.

- 4) Hitung matriks invers R^{-1}
- 5) Hitung semua koefisien jalur ρ_{yxi} , $i = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, k$ melalui rumus
- 6) $R^2_{Y(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)}$ yaitu koefisien yang menyatakan Determinasi total X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 (dalam analisis regresi koefisien ini disebut Koefisien Determinasi Multipel)
- 7) Hitung $\rho_{Y\varepsilon}$ (koefisien jalur variabel lainnya)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan dua cara yaitu: pengujian secara bersama-sama (simultan) dan pengujian secara individual (parsial).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Adapun dalam proses analisisnya menggunakan bantuan *software* Lisrel 8.80 for Windows. Persamaan yang diperoleh dari proses analisis adalah sebagai berikut :

Model Persamaan

$$Y = 0.37 X_1 + 0.20 X_2 + 0.27 X_3 + 0.25 X_4 + 0.03 X_5 + \varepsilon$$

$$\varepsilon = \text{Errorvar} = 0.17, R^2 = 0.83$$

Dari persamaan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Koefisien regresi X_1 adalah 0.37, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Lingkungan Pengendalian sebesar satu satuan nilai akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.37 satuan nilai atau 37% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
2. Koefisien regresi X_2 adalah 0.20, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Penilaian Resiko sebesar satu satuan nilai akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.20 satuan nilai atau 20%

dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

3. Koefisien regresi X_3 adalah 0.27, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Kegiatan Pengendalian sebesar satu satuan nilai akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.27 satuan nilai atau 27% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
4. Koefisien regresi X_4 adalah 0.25, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Informasi dan Komunikasi sebesar satu satuan nilai akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.25 satuan nilai atau 25% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
5. Koefisien regresi X_5 adalah 0.03, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Penilaian Resiko sebesar satu satuan nilai akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.03 satuan nilai atau 3% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

Nilai Errorvar yaitu sebesar 0.17 memperlihatkan besarnya pengaruh faktor lain di luar Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu sebesar 17%. Sementara itu nilai R^2 atau koefisien determinasi multipel sebesar 0.83 memperlihatkan besarnya pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan secara keseluruhan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu sebesar 83%.

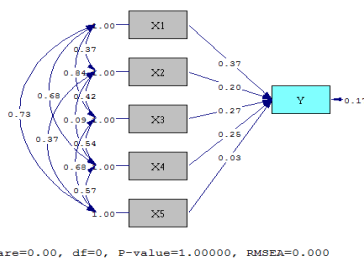
Secara simultan dalam penelitian ini dapat kita lihat, bahwa hasil dari pengujian hipotesis yang diajukan yakni terdapat pengaruh sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Berdasarkan nilai F hitung kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel dimana diperoleh nilai F_{hitung}

sebesar 24.41 dan nilai F_{tabel} 2.52 ternyata lebih besar dari nilai F di tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Atau dengan kata lain sistem pengendalian intern yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian (X_1), Penilaian Resiko (X_2), Kegiatan Pengendalian (X_3), Informasi dan Komunikasi (X_4), dan Pemantauan (X_5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk pengujian secara parsial memperlihatkan besarnya nilai t_{hitung} yang dihasilkan melalui perhitungan dengan bantuan *software* Lisrel 8.80 for windows adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Kesimpulan Pengujian Secara Individual

Var	t_{hitung}	t_{tabel}	Kesimpulan
X_1	2.00	1.6957	Positif dan signifikan
X_2	2.04	1.6957	Positif dan signifikan
X_3	1.68	1.6957	Positif dan tidak signifikan
X_4	2.12	1.6957	Positif dan signifikan
X_5	0.20	1.6957	Positif dan tidak signifikan

Dari tabel 2 diatas terlihat bahwa X_1 , X_2 , dan X_4 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya apabila terjadi perubahan sedikit saja pada variabel X_1 (*Lingkungan Pengendalian*), X_2 (*Penilaian Resiko*), X_4 (*Informasi dan komunikasi*) maka akan langsung terjadi perubahan yang berarti pada variabel Y (*Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*), selain itu pengaruhnya dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi OPD di Kabupaten Cianjur. Sedangkan X_3 dan X_5 memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. Artinya variabel X_3 (*Kegiatan Pengendalian*), X_5 (*Pemantauan*) pengaruhnya tidak dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi OPD di Kabupaten Cianjur.



Gambar 2
Hasil Analisis Jalur

Dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) kita dapat mengetahui pengaruh secara langsung dan tidak langsung tiap variabel bebas (X) terhadap variabel terkait (Y). Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 4.
Total Pengaruh

Var	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung				Total
		X_1	X_2	X_3	X_4	
X_1	0.1369	0.027	0.083	0.062	0.008	0.319
X_2	0.04	0.027	0.022	0.004	0.002	0.096
X_3	0.0729	0.083	0.022	0.036	0.005	0.221
X_4	0.0625	0.062	0.004	0.036	0.004	0.170
X_5	0.0009	0.008	0.002	0.005	0.004	0.021
Pengaruh Total						0.829

Atas dasar perhitungan diatas hasil penelitian yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian (X_1) secara langsung menentukan perubahan-perubahan Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 13.69% dan secara tidak langsung yang melalui hubungannya dengan Penilaian resiko (X_2), Kegiatan Pengendalian (X_3), Informasi dan Komunikasi (X_4), dan Pemantauan (X_5) sebesar 31.9199%.
2. Penilaian Resiko (X_2) secara langsung menentukan perubahan-perubahan Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 4% dan secara tidak langsung yang melalui hubungannya dengan Lingkungan Pengendalian (X_1), Kegiatan Pengendalian (X_3), Informasi dan Komunikasi (X_4), dan Pemantauan (X_5) sebesar 9.678%.
3. Kegiatan Pengendalian (X_3) secara langsung menentukan perubahan-perubahan Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 7.29% dan secara tidak langsung yang melalui hubungannya dengan Lingkungan Pengendalian (X_1), Penilaian Resiko (X_2), Informasi dan Komunikasi (X_4), dan Pemantauan (X_5) sebesar 22.1454%.
4. Informasi dan Komunikasi (X_4) secara langsung menentukan perubahan-perubahan Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 6.25% dan secara tidak langsung yang melalui hubungannya dengan Lingkungan

Pengendalian (X_1), Penilaian Resiko (X_2), Kegiatan Pengendalian (X_3), dan Pemantauan (X_5) sebesar 17.0625%.

5. Pemantauan (X_5) secara langsung menentukan perubahan-perubahan Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0.09% dan secara tidak langsung yang melalui hubungannya dengan Lingkungan Pengendalian (X_1), Penilaian Resiko (X_2), Kegiatan Pengendalian (X_3), dan Informasi dan Komunikasi (X_4) sebesar 2.1006%.
6. Lingkungan Pengendalian (X_1), Penilaian Resiko (X_2), Kegiatan Pengendalian (X_3), Informasi dan Komunikasi (X_4), dan Pemantauan (X_5) secara bersama-sama mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 83%. Besarnya pengaruh secara proporsional yang disebabkan oleh variabel lainnya di luar variabel diatas yaitu sebesar 17%.

Hasil perhitungan diatas memperlihatkan bahwa Lingkungan Pengendalian memiliki porsi pengaruh yang Paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara simultan;
2. Secara parsial, Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Secara parsial, Terdapat pengaruh tidak signifikan antara Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Saran

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus meningkatkan lingkungan pengendalian dengan memperhatikan komitmen terhadap kompetensi dan memiliki prosedur yang efektif untuk memantau hasil kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan. Dalam meningkatkan penilaian resiko, Instansi Pemerintah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus meningkatkan informasi dan komunikasi dengan menggunakan berbagai bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhannya serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasinya dalam upaya meningkatkan komunikasi secara berkesinambungan.

Untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah, pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kegiatan pengendalian dengan mempertimbangkan pelimpah tugas secara sistematis ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya *checks and balances*. Sebaiknya aparat pengawasan (Inspektorat Daerah) hendaknya lebih efektif dalam melakukan pembinaan seperti melakukan kontrol secara rutin pada OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, Primastuti. 2006. *Kualitas Sistem Pengendalian Intern Sebagai Penentu Tingkat Kepercayaan Laporan Keuangan Suatu Pemerintah Daerah*. Widyapraja, Vol. 32, No. 3, Tahun 2006.
- Anwar Nasution. 2007. *Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah*. Jakarta : IAI-KSAP.

- Darya Setia Nugraha. 2010. *The Influence Of Internal Control System To The Reliability Of Local Government Financial Statement (Case Study at Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi, Vol. 2, No. 2 November 2010).
- Harun, Al-Rasyid. 2001. *Analisis Jalur (Path Analisis)*. Bandung : Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran.
- Hall, James A. 2007. *Accounting Information System: Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- I Gusti Agung Rai. 2010. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indra Bastian. 2011. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Fokusmedia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Nuansa Aulia.
- Permendagri No.13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Tony, Triyulianto. 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bersama Kita Bisa Menyongsong Masa Depan BPKP yang Lebih Cerah*. Bulletin Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Vol. 1, No. 4, 24 Oktober 2008.
- Umi Narimawati. 2007. *Teknik-teknik Analisis Multivariat*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Warren, S.Carol., and Reeve, M.James., and Fess, E.Philip. 2005. *Corporate Financial Accounting*. South Western: Thomson.
- Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari. 2009. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya)*. Jurnal Akuntansi FE UNSIL, Vol. 4, No. 1, 2009.
- Weygandt, J.J., et al. (2005). *Accounting principles*. New York: John Wiley & Sons.